

PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DESA SEBAGAI PROGRAM INOVASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI DI DESA KUBUTAMBAHAN

Oleh

Kadek Ayu Widya Arisanthi, NIM. 2214101024

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program inovasi Kanwil Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara serta data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui undang-undang tentang bantuan hukum dan dokumen yang berkaitan dengan layanan bantuan hukum. Dalam Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Data diproses melalui tahapan reduksi data dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan belum optimal karena keterbatasan jumlah paralegal yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat desa dan belum terbentuknya Kelompok Kadarkum sebagai pelaksana penyuluhan hukum di masyarakat sehingga kegiatan penyuluhan hukum belum berjalan. (2) Hambatan dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Kubutambahan yakni dari faktor penegak hukum yaitu minimnya jumlah paralegal, belum terbentuknya Kelompok Kadarkum, kurangnya sumber daya manusia penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Bali dalam pelaksanaan sosialisasi program dan koordinasi, faktor sarana atau fasilitas yaitu keterbatasan ruang mediasi dan konsultasi hukum yang kondusif dan kurangnya pemanfaatan fasilitas digital untuk pelaporan perkara. Serta faktor masyarakat yaitu rendahnya pemahaman hukum masyarakat Desa Kubutambahan dikarenakan minimnya sosialisasi program dan belum terlaksananya layanan penyuluhan hukum

Kata Kunci: Pos Bantuan Hukum Desa, Program Inovasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

**THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE LEGAL AID POST AS AN
INNOVATIVE PROGRAM OF THE REGIONAL OFFICE OF THE
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS BALI IN KUBUTAMBAHAN
VILLAGE**

By

Kadek Ayu Widya Arisanthi, NIM. 2214101024

Law Studies Program

ABSTRACT

This study aims to (1) examine and analyze the implementation of the Village Legal Aid Post as an innovative program of the Regional Office of the Ministry of Law Bali in Kubutambahan Village (2) identify the factors that hinder its implementation. This research is an empirical legal study with a descriptive approach. Primary data were observation and interviews, while secondary data were collected from legal aid legislation and documents related to legal aid services. Data collection techniques included document study, observation, and interviews, with a Non-Probability Sampling method using purposive sampling. The data were processed through data reduction and analyzed qualitatively.

The findings show that the implementation of the Village Legal Aid Post in Kubutambahan Village has not optimal. This condition is influenced by an insufficient number of paralegals compared to the village population and the absence of the Kadarkum Group, resulting in the lack of legal counseling activities. The obstacles identified include institutional factors such as the limited number of paralegals, the absence of the Kadarkum Group, and the limited human resources of legal educators at the Regional Office of the Ministry of Law Bali in conducting program socialization coordination. Facility-related barriers include lack of conducive mediation and consultation rooms and the limited use of digital tools for case reporting. Community-related factors also contribute, particularly the low level of legal awareness caused by minimal program socialization and the absence of legal counseling services.

Keywords: *Village Legal Aid Post, Innovative Program, Regional Office of the Ministry of Law.*